

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai angka 15,81 juta kunjungan dan pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 16,11 juta kunjungan (Data BPS). Itu berarti jumlah kunjungan 2 tahun terakhir dari 2018 ke 2019 mengalami peningkatan 1,88% (Indonesia, 2019). Hal tersebut tentu merupakan peningkatan yang sangat bagus karena dengan demikian, devisa negara juga akan mengalami peningkatan. Sehingga akan dapat membantu perkembangan ekonomi Indonesia.

Namun dari sisi lain, kehadiran wisatawan mancanegara tidak melulu menjadi prioritas karena bagaimanapun keadaannya, kehadiran wisatawan nusantara atau lokal juga tidak kalah penting. Karena dengan adanya wisatawan nusantara atau lokal pasti akan dapat mendorong pengembangan dari berbagai macam hal. Dengan banyaknya wisatawan lokal juga pasti akan mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan nasional sebuah negara. Maka tidak heran jika pemerintah terus menerus dengan gencarnya melakukan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini pariwisata merupakan salah satu andalan pemerintah dalam membantu meningkatkan perekonomian.

Keseriusan pemerintah dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata di Indonesia memanglah tidak main-main. Sebagai contoh kita dapat melihat saat ini pemerintah banyak mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa daerah yang dimana kawasan tersebut juga menjadi daerah pariwisata. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus seperti itu positifnya adalah pemerintah serius dalam mendukung segala jenis pembangunan yang berpotensi membuat kawasan tersebut menjadi lebih bagus dan nyaman lagi bagi para wisatawan nusantara ataupun mancanegara. Namun jika dilihat dari sisi lainnya, dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus tersebut pemerintah seperti kurang memperhatikan beberapa kawasan yang pada dasarnya memiliki potensi yang cukup untuk menarik minat wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Setiap pulau yang berada di Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan khusus untuk mneggaet para wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal untuk datang berkunjung. Salah satu contohnya adalah pulau Lombok. Pulau Lombok memang memiliki banyak sekali destinasi wisata, mulai dari wisata pantai, wisata pegunungan dan beberapa destinasi lainnya. Kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal cenderung semakin bertambah setiap tahunnya. Namun pada tahun 2018 jumlah wisatawan menurun 2sset2r yang diakibatkan oleh bencana alam yakni gempa bumi yang menerjang pulau Lombok pada akhir juli sampai dengan akhir agustus tahun 2018. Setelah kejadian tersebut, pemerintah dengan gencarnya melakukan perbaikan atau normalisasi beberapa kawasan wisata agar dapat membuat pengunjung merasa nyaman untuk kembali berwisata ke Pulau Lombok.

Terkhusus adalah kabupaten Lombok Timur. Sebelum terjadinya bencana alam tersebut pun sebenarnya pemkab memang sudah gencar melakukan pengembangan-pengembangan, perbaikan atau bahkan sampai dengan membuka kawasan wisata baru untuk memikat para wisatawan agar mau berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur. Namun disisi lain, masih banyak sekali kawasan-kawasan wisata yang memang sudah ada dari beberapa saat yang lalu tidak diperhatikan bahkan banyak bangunan yang hanya dibangun dan dibiarkan begitu saja tidak dirawat. Padahal kawasan tersebut memiliki daya tarik tersendiri yang dapat memikat para wisatawan. Namun, karena kondisi tempat tersebut yang masih dapat dikatakan belum layak menyebabkan kawasan tersebut menjadi kurang peminat. Tidak hanya itu, bahkan pada beberapa kawasan wisata pernah ditemukan bahwa fasilitas yang dibuat oleh pemkab dibongkar oleh warga sekitar dengan tujuan untuk dijual komponen-komponen benda tersebut. Tidak jarang memang hal tersebut ditemukan. Karena pada dasarnya masih banyak warga masyarakat sekitar yang tidak mengerti fungsi dari fasilitas yang telah dibangun tersebut sehingga terjadi seperti hal tersebut.

Berdasarkan hal yang terjadi diatas, dapat dilihat bahwa masih kurangnya koordinasi maupun komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga kejadian-kejadian tersebut masih sering sekali terjadi. Namun, akhir-akhir ini terdapat beberapa pantai yang sedikit demi sedikit dibenahi sehingga membuat minat pengunjung untuk berwisata kembali lagi. Salah satu contohnya adalah wisata pantai Ekas yang terletak di Desa Ekas Buana, Jerowaru, Lombok Timur. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai Ekas akhir-akhir ini jika dilihat dari biasanya bertambah walaupun tidak banyak. Hal tersebut dikarenakan oleh ditempat itu sudah tersedia beberapa fasilitas seperti café,

toilet, parkir yang semakin 4sset4ry yang lainnya. Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih sangat banyak kekurangan dari kawasan wisata ini yang harusnya lebih diperhatikan lagi agar mampu semakin menarik minat para pengunjung untuk berwisata.

Oleh karena itu, akan sangat menarik untuk diteliti dan diketahui bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan dengan kelompok sadar wisata dan juga tentunya dengan masyarakat sekitar sehingga kawasan wisata tersebut dapat berkembang sedemikian rupa. Penelitian ini teretus diakibatkan oleh perkembangan yang dialami kawasan wisata tersebut tidak diikuti oleh kawasan-kawasan lain yang berada di sekitar kawasan tersebut. Karena pada dasarnya, kawasan pantai Ekas ini memang sangat berdekatan dengan banyak pantai lain yang tidak kalah indahnya, akan tetapi kalah dalam segi fasilitas. Akan menjadi sangat penting untuk diketahui langkah yang dilakukan oleh pengelola kawasan Pantai Ekas ini bersama dengan kelompok sadar wisatanya dan juga tentunya dengan Pemkab sehingga dapat berkembang sedemikian rupa. Hal ini diharapkan agar kawasan-kawasan wisata lain yang berada disekitar kawasan pantai Ekas tersebut dapat mengikuti perkembangannya. Sehingga akan menjadi keuntungan baik bagi masyarakat sekitar dan juga tentunya bagi Pemkab itu sendiri.

Akan tetapi, seperti yang dikatakan diatas memang masih banyak yang perlu dibenahi, masih banyak kekurangan dari kawasan itu sendiri. Dari kekurangan-kekurangan tersebut pasti memiliki alasan mengapa hal tersebut tidak dibenahi. Entah itu dari masyarakatnya atau mungkin dari pemerintah itu sendiri. Jadi selain untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara ketiga stakeholder tersebut, penelitian ini juga ditujukan untuk dapat mengetahui problem atau halangan-halangan dalam pembenahan

kawasan wisata tersebut. Jika halangan-halangan tersebut memang sudah jelas, maka akan mudah untuk dicari jalan keluarnya sehingga dapat sama-sama saling menguntungkan.

Studi ini membahas tentang konsep collaborative governance dalam pengembangan sebuah kawasan wisata. Karena jika melihat permasalahan yang sering terjadi seperti kasus diatas, maka sudah seharusnya pemerintah memang melibatkan masyarakat secara langsung dalam melakukan sebuah pengembangan terlebih lagi yang menyangkut kepentingan bersama. Kolaborasi menjadi sangat penting karena untuk meminimalisir atau menghindari masalah. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat menjadi merasa dilibatkan ketika pemerintah menggunakan metode kolaborasi atau kerjasama. Dalam penelitian kali ini yang menyebabkan peneliti mengambil studi kasus pada kawasan wisata pantai Ekas ini sendiri dikarenakan pantai Ekas ini merupakan salah satu pantai yang saat ini sangat gencar dilakukan pengembangan dan dijadikan prioritas oleh Dinas Pariwisata kabupaten Lombok Timur. Oleh karenanya akan sangat menarik untuk mengetahui perkembangan dari kawasan tersebut karena akan sangat berdampak terhadap wisata Lombok Timur. Selain itu, peneliti mengambil studi kasus pada kawasan Ekas ini karena Pantai Ekas merupakan salah satu pantai yang perkembangannya cukup pesat jika dibandingkan dengan beberapa pantai yang berada disekitarnya. Sehingga akan sangat menarik untuk mengetahui mengapa kawasan Ekas dapat berkembang ketika kawasan lain masih belum dikelola secara maksimal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana strategi Collaborative Governance dalam pengembangan wisata pantai Ekas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tahun 2020
- b. Apa hambatan dan dukungan dalam Collaborative Governance dalam melakukan pengembangan wisata pantai Ekas kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur tahun 2020

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Secara eksplisit, terdapat beberapa tujuan dari penelitian yang akan dilakukan tersebut. Yang pertama tentu untuk mengetahui bagaimana strategi kolaborasi yang dilakukan ketiga stakeholder tersebut agar dapat ditiru oleh kawasan-kawasan wisata lain. Sehingga banyak kawasan wisata yang dapat berkembang pesat dan diharapkan mampu mendongkrak kehidupan masyarakat yang berada disekitar kawasan wisata tersebut. Kedua adalah untuk mengetahui hambatan atau permasalahan atau halangan yang dihadapi sehingga dicari solusi bersama agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi namun tidak ada yang merasa dirugikan, baik itu dari masyarakat sekitar, kelompok sadar wisata, maupun dinas terkait dari pemerintah kabupaten setempat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan agar dapat mengetahui dukungan seperti apa yang didapatkan dalam pelaksanaan Collaborative Governance dalam hal ini pengembangan kawasan wisata Pantai Ekas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat atau dilaksanakan tidak hanya sebagai tulisan semata, namun memiliki beberapa manfaat yang dimana manfaat ini ditujukan kepada masyarakat

khususnya pada daerah kabupaten itu sendiri. Adapun manfaatnya antara lain sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilaksanakan untuk kepentingan atau keperluan dalam rangka pengembangan pengetahuan terkhususnya pengembangan pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Karena pada penelitian ini akan membahas tentang kolaborasi tiga (3) stakeholder dalam melakukan pengembangan kawasan wisata. Penelitian ini juga kedepannya diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya karena memang masih sangat jarang yang melakukan penelitian serupa di daerah tersebut.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan dibuatnya penelitian ini, tentu sangat diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber informasi yang bermanfaat atau 7sset7 informasi bagi masyarakat yang berada kawasan wisata lain agar mampu untuk melakukan pengembangan di daerah kawasan wisata mereka masing-masing. Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pihak pemerintah terkait dengan pengembangan kawasan wisata agar nantinya ketika akan melakukan pengembangan ditempat lain maka pemerintah sudah memiliki gambaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi dan tentunya dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber bacaan bagi para pembacanya.

### **1.5 Literatur Review**

| No | Penulis dan Judul Jurnal  | Rangkuman   |
|----|---|---|
| 1  | <p>Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. <i>Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial</i>, 4(1), 1-23.</p>              | <p>Posisi Ubud sebelumnya berada pada posisi ke-3 dan setelah mendapatkan berbagai macam masalah, Ubud kini berada pada peringkat 9 secara internasional (Tribunnews, 2017). Sebenarnya, Gianyar memiliki beberapa potensi wisata lain yang akan memberikan dampak positif apabila dapat dikelola dengan baik. Pengembangan atau pembangunan kawasan wisata tersebut saat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah saja. Namun hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dengan berbagai stakeholder lain.</p> |
| 2  | <p>Sururi, A. (2018). Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). <i>Humanika</i>, 25(1), 24-37.</p> | <p>Potensi wisata yang dimiliki oleh Banten adalah wisata religi dan juga dijadikan sebagai cagar budaya. Sangat dibutuhkannya kerja sama antar semua wilayah yang terlibat dalam penataan, pembangunan ataupun pengelolaan kawasan Banten Lama tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan tersebut entah itu dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab bersama antara semua stakeholder-stakeholder yang berada di daerah kawasan tersebut.</p>  |
| 3  | <p>Harmawan, B. N. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival.</p>   | <p>Acara Banyuwangi Ethno Carnival berkonsep mempertunjukkan kebudayaan-kebudayaan khas dari daerah itu sendiri. Acara ini dinilai sangat berhasil setiap tahunnya karena keseriusan dari pihak pemda Banyuwangi itu sendiri. Ditambah dengan semangat antusiasme masyarakat setempat yang sangat mendukung acara ini sehingga dapat</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | berlangsung dengan keberhasilan. Oleh karena itu, kerja sama antar seluruh stakeholder sangat-sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan apapun.   |
| 4 | Syahputra, K. A., & Ma'ruf, M. F. (2020). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Sektor Pantai (Studi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar dan Pemerintah Desa Serang Kabupten Blitar). <i>Publika</i> , 8(4). | Pantai Serang menjadi salah satu prioritas pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Blitar. Di kawasan pantai Serang itu sendiri, sering diadakan pertunjukan-pertunjukan kegiatan adat atau kebudayaan sehingga menjadi penambah daya tarik pengunjung untuk berlibur atau berwisata ke tempat tersebut. Salah satu kebudayaan yang sering ditampilkan pada kawasan pantai serang ini adalah upacara adat yang dilaksanakan setiap bulan suro. Salah satu contohnya adalah melakukan <i>Focus Group Discussion Collaborative Destination Development. Collaborative Destination Development</i> ini sendiri merupakan sebuah forum atau sebuah wadah untuk berkolaborasi bagi seluruh pelaku pariwisata nasional maupun pariwisata daerah Selain kerja sama dengan berbagai instansi, pemerintah Blitar juga melaksanakan kerja sama dengan Perhutani. |
| 5 | Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata. <i>Jurnal Kebijakan Publik</i> , 11(1), 7-12.   | Pengembangan kawasan desa wisata tersebut dimulai oleh pemerintah melalui kementerian BUMN yang dimana memiliki program bernama Balai Ekonomi Desa (Balkondes). Balkondes ini akan memberikan manfaat sebagai sebuah etalase bagi perekonomian daerah, yang dimana Balkondes ini sendiri akan memberikan ruang bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | desa. Program Balokndes ini tidak hanya dibantu oleh pihak BUMN pendamping saja, namun terdapat juga kurang lebih 20 BUMN sponsor yang akan membantu berjalannya program Balkondes tersebut.   |
| 6 | Diani, R. M., & Simbolon, Y. K. G. (2017, June). Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. In <i>Forum Ilmu Sosial</i> (Vol. 44, No. 1, pp. 43-54). | Berdasarkan data, jumlah wisatawan gunung Merapi menurun 80% sejak terjadinya bencana letusan tersebut (BPS DIY, 2012). Sangat dibutuhkannya keterlibatan dari pihak swasta maupun masyarakat dalam pengembangan atau pengelolaan kawasan wisata tersebut. Kolaborasi antara ketiga pilar yakni pemerintah, swasta dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan bentuk partisipasi yang dimana upaya untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi di bidang pariwisata merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kebijakan dan perencanaan pariwisata.   |
| 7 | Putra, D. A. Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul.  | Pada tahun 2017, jumlah pengunjung di seluruh objek wisata Gunung Kidul mencapai sekitar 12.000 pengunjung dan dari data sementara yang hari ini, jumlah pengunjung mencapai 39.554 orang dengan jumlah PAD Rp. 305.614.000. Gunung Kidul juga memiliki berbagai macam jenis wisata lain. Salah satu contohnya adalah Goa Pindul. Akan tetapi, kahir-akhir ini terdapat konflik dapat pengelolaan ataupun pengembangan objek wisata goa pindul ini. Hal ini terjadi karena terdapat 2 organisasi berbeda yang mengelola objek wisata ini. Jika dikelola dengan kerja sama yang baik, maka mungkin saja objek wisata goa pindul ini akan menjadi primadona baru bagi para |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | wisatawan yang berkunjung.   |
| 8 | Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. <i>FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik</i> , 4(2), 112-127. | Tidak hanya wisata budaya, kabupaten Luwu juga memiliki wisata alam yang potensial untuk dikembangkan. Maka sudah seharusnya pemerintah mampu mengelola dan mengembangkan potensi-potensi yang ada agar dapat lebih menarik minat dari para wisatawan yang akan berkunjung. Namun pada kenyataannya masih banyak beberapa kawasan wisata yang dapat dikatakan tidak terurus dan tidak dikelola dengan baik. Akibatnya daya tarik dari kawasan wisata yang ada di daerah tersebut dapat dikatakan relative sepi dari pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Proses penentuan pola pengembangan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, agar sifatnya inklusif, komprehensif dan sinergis. |
| 9 | Wawo, A. K. A. S. (2020). Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Festival Pinisi Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).   | Objek wisata yang menjadi andalan utama Bulukumba pantai Bira berjarak 42 km dari Kota Bulukumba. Daerah tersebut memiliki sebuah acara festival budaya yang diinisiasikan oleh Dinas Pariwisata setempat. Dalam pelaksanaan festival ini sendiri terdapat beberapa stakeholder yang terlibat diantaranya Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, pihak swasta dalam hal ini PT.Yasika Kreasi Utama, Bank BPD SULSELBAR, PT. Suraco Jaya Abadi Motor, Same Hotel, Syafruddin selaku pengusaha kapal, dan masyarakat dalam hal ini para tokoh adat Bonto Bahari dan tokoh adat Kajang. Sangat diperlukannya kolaborasi dengan pihak lain.   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 10 | <p>Syawal, S. S., &amp; Samuda, S. (2017). <i>Dinamika Collaborative Governance Dalam Festival Legu Gam Sebagai Wisata Kultural Kota Ternate. Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara</i>, 5(2).</p>               | <p>Legu Gam kebudayaan khas dari kesultanan Ternate yang dimana dilakukan sebagai tradisi adat istiadat yang melibatkan para bangsa, Soangare, Ngofa se Dano-dano dan balakusu sekano kano. Sejak Tahun 2013, Festival Legu Gam ini sendiri sudah masuk dalam kalender pariwisata nasional. Adapun beberapa stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini antara lain Kesultanan Ternate dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau Kesultanan Ternate dengan pihak swasta, masyarakat dan pelaku pariwisata.</p>   |
| 11 | <p>Hariyoko, Y., Biadi, E. P., &amp; Soesiantoro, A. (2020). <i>Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Mojokerto Dengan Pendekatan Collaborative Governance (Studi Kasus Pemandian Air Panas Pacet). GOVERNANCE</i>, 10(2).</p> | <p>Lokasi dari objek wisata pacet ini terletak di lereng utara Gunung Welirang. Terdapat beberapa objek wisata yang berada pada kawasan pacet tersebut. Salah satu objek wisata yang ada adalah objek wisata pemandian air panas Padusan. Pemandian ini pada dasarnya memang sudah terkelola dengan baik. Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya para pengunjung yang masih mengeluhkan biaya yang dikeluarkan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Jika ingin mengembangkan potensi alam menjadi kawasan wisata sangat penting untuk adanya keterlibatan dan kolaborasi atau kerja sama antar stakeholder-stakeholder yang memang kewajibannya untuk itu seperti Pemerintah setempat, masyarakat dan juga tentunya dari pihak swasta.</p> |
| 12 | <p>Cahyono, F. T. (2019). <i>Collaborative Governance dalam Pembangunan Destinasi</i></p>  | <p>Desa Kedung Banteng sangat memanfaatkan dengan baik kolaborasi atau kerja sama antara berbagai pihak dalam pembangunan atau pengembangan kawasan agrowisata yang mereka</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p><i>Agrowisata Kedung Banteng (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Eks. Lokalisasi Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)</i> (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).</p> | <p>miliki. Hal yang menarik dari pembangunan objek wisata ini adalah karena lahan tempat dibangunnya objek tersebut merupakan bekas tempat lokalisasi. Jika tidak dilakukan kerja sama antar berbagai macam pihak, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi berbagai macam hambatan seperti terbatasnya kemampuan yang dimiliki, keterbatasan sumber daya maupun beberapa faktor pendukung lainnya.</p>  |
| 13 | <p>Rozikin, M., Wismanu, R. E., &amp; Muttaqin, A. (2019). Model Collaborative Governance dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism.</p>                                | <p>Kearifan lokal dapat digunakan sebagai produk kreatifitas yang dimana dapat membangun pariwisata dengan berbasis kearifan lokal (<i>Local indigenous</i>). Sebenarnya 13sset13ry pariwisata memang sangatlah penting bagi suatu daerah. Tidak hanya sebagai tempat untuk bersantai namun objek wisata juga dapat digunakan sebagai wadah untuk memperkenalkan budaya-budaya ataupun adat istiadat yang dimiliki tempat tersebut. Hal tersebut menjadikan para wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya masyarakat setempat dan juga memahami latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut (Spillane, 1994).</p> |
| 14 | <p>Kirana, C. A. D., &amp; Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. <i>Kolaborasi: Jurnal Administrasi</i></p>                                     | <p>Pembangunan di suatu tempat dapat dikategorikan berhasil apabila mereka mampu memaksimalkan atau mengoptimalkan dengan baik segala jenis potensi yang mereka miliki. Dalam sebuah buku yang berjudul Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata (Sedarmayanti, 2014) mengatakan bahwa</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <i>Publik</i> , 6(1), 68-84.  | pariwisata Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun walaupun demikian, tidak mungkin pariwisata dapat maksimal jika hanya masyarakat saja yang menangani dan mengelolanya. Beberapa komponen yang harus ikut serta dalam pengelolaannya antara lain pemerintah, dunia usaha atau masyarakat (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pers, LSM, dan akademisi).   |
| 15 | Zaenuri, M. (2018).<br>Mengelola Pariwisata-<br>Bencana: Perlunya<br>Perubahan Paradigma<br>Pengelolaan Pariwisata<br>Dari Adaptive<br>Governance Menuju<br>Collaborative<br>Governance. <i>Unisia</i> , 36(8<br>1), 157-168. | Sejak terjadinya bencana letusan gunung Merapi di Yogyakarta, banyak sekali objek atau destinasi wisata yang berada di kabupaten Sleman menjadi terganggu. Selama ini dalam pengembangan ataupun pengelolaan pariwisata, masih banyak menggunakan sistem adaptif. Kemampuan adaptif ini terutama dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan dan untuk memberikan pengaturan kelembagaan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan (Eakin dan Lemos 2006). Agar proses pengelolaan bencana yang dimasukkan ke dalam pariwisata, maka pola adaptif seharusnya diganti dengan pola Kolaboratif Governance agar kemungkinan lebih mempermudah recovery maupun pengelolaan dari kawasan tersebut. |
| 16 | Ali, M., Amil, A., &<br>Zulhadi, Z. (2018).<br>Implementasi Kebijakan<br>Collaborative Governance<br>dalam Tata Kelola  | Promosi wisata memang sangat dibutuhkan terutama oleh daerah-daerah yang masih terkategori daerah pelosok yang dimana salah satunya adalah kabupaten Lombok Utara yang notabennya daerah otonom baru. Seharusnya   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <p>Kawasan Pariwisata pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. <i>Jurnal Ulul Albab</i>, 22(1).</p>  | <p>pemerintah tanggap dengan kondisi daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di sektor pariwisata agar semua objek wisata lokal yang ada di daerahnya dapat terangkat dan terknal sampai ke luar. Tentu tidak hanya tugas dari pemerintah, masyarakat pun juga memiliki peran penting dalam rangka promosi kawasan wisata yang mereka miliki. Karena dengan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakatnya maka akan cenderung lebih mudah untuk menaikkan nama sebuah objek atau destinasi wisata.</p> |
| 17 | <p>Habib, R. P. A. S. (2018). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Festival Teluk Jailolo Sebagai Wisata Budaya Di Kabupaten Halmahera Barat. <i>Ejournal KAWASA</i>, 8(4), 35-47.</p>          | <p>Festival budaya yang dimaksud disini adalah Festival Teluk Jailolo (FTJ). Promosi wisata melalui festival budaya ini memang cukup serius dilakukan oleh pemerintah setempat. Dapat dilihat dari dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Festival Teluk Jailolo. Selain itu, daerah ini juga terdapat banyak desa wisata yang dimana pada tahun 2015 pemerintah setempat membuat sebuah program yakni program desa wisata.</p>   |
| 18 | <p>Sambodo, G. T., &amp; Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. <i>Journal of Governance and Public Policy</i>, 3(1).</p> | <p>Pemerintah DIY sendiri sebenarnya memang sudah lama mengimplementasikan kebijakan Collaborative Governance ini. Namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya antara yang ada di DIY dengan daerah lainnya. DIY memiliki desa budaya yang dimana desa ini memang terdapat beberapa perbedaan dengan desa wisata yang ada di daerah lain. Yang menjadi sedikit pembeda adalah di DIY desa budaya dijadikan sebagai wahana untuk melakukan aktivitas budaya yang</p>  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | mengekspresikan system kepercayaan, system kesenian, system mata pencaharian, system teknologi, system komunikasi, system social, dan system lingkungan, tata ruang, dan arsitektur.  |
| 19 | Yusup, F. (2018). <i>Relasi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Tata Kelola Kawasan Wisata Grand Pangandaran</i> (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).   | Kabupaten Pangandaran yang merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru saat ini sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisatanya. Notabennya kabupaten Pangandaran sendiri memiliki potensi wisata bahari yang cukup banyak. Salah satu destinasi yang menjadi favorit dan paling diunggulkan adalah Pantai Pangandaran. Akan tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ataupun pengelolaan suatu kawasan wisata akan lebih maksimal jika dilakukan tidak hanya oleh satu pihak. Melainkan harus dilakukan secara bersama antara pemerintah, swasta dan juga tentunya masyarakat yang dimana ketiga actor tersebut tentu memiliki peran yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. |
| 20 | Putri, N. H. (2020). <i>Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2019 (Studi Pada Pengembangan Kawasan Wisata Mandeh)</i> (Doctoral dissertation). | Salah satu kawasan yang memiliki potensi wisata yang cukup besar adalah kawasan wisata Mandeh. Kawasan Mandeh ini mendapatkan predikat sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Bahari Terpadu Mandeh. Pengembangan kawasan wisata Mandeh ini benar-benar dilaksanakan dengan serius mengingat potensi wisatanya yang sangat begitu besar. Keseriusan pengelolaan maupun pengembangan kawasan ini dapat dilihat dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan pemerintah Nagari selain masih akan   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | mempersiapkan sarana dan prasarana lainnya untuk dapat menunjang pengembangan kawasan wisata Mandeh. Selain itu pihak pemerintah juga memberdayakan masyarakat lokal dengan cara memberi pelatihan-pelatihan kepada warga agar dapat menjadi pemandu wisata dan beberapa pelatihan lain. |
|--|--|--|

*Tabel 1.1 Literatur Review*

Dalam penelitian ini mungkin sama-sama menggunakan konsep Collaborative Governance dengan penelitian sebelumnya. Namun yang pasti akan memiliki perbedaan. Perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini adalah jika dipenelitian-penelitian sebelumnya adalah teknik pengembangan yang dilakukan. Beberapa jurnal diatas melakukan pengembangan sebuah kawasan wisata salah satunya dengan membuat acara-acara untuk menarik minat wisatawan. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada pengembangan sarana-prasarana, infratraktur, pelayanan dan sebagainya untuk penunjang pengembangan pariwisata.

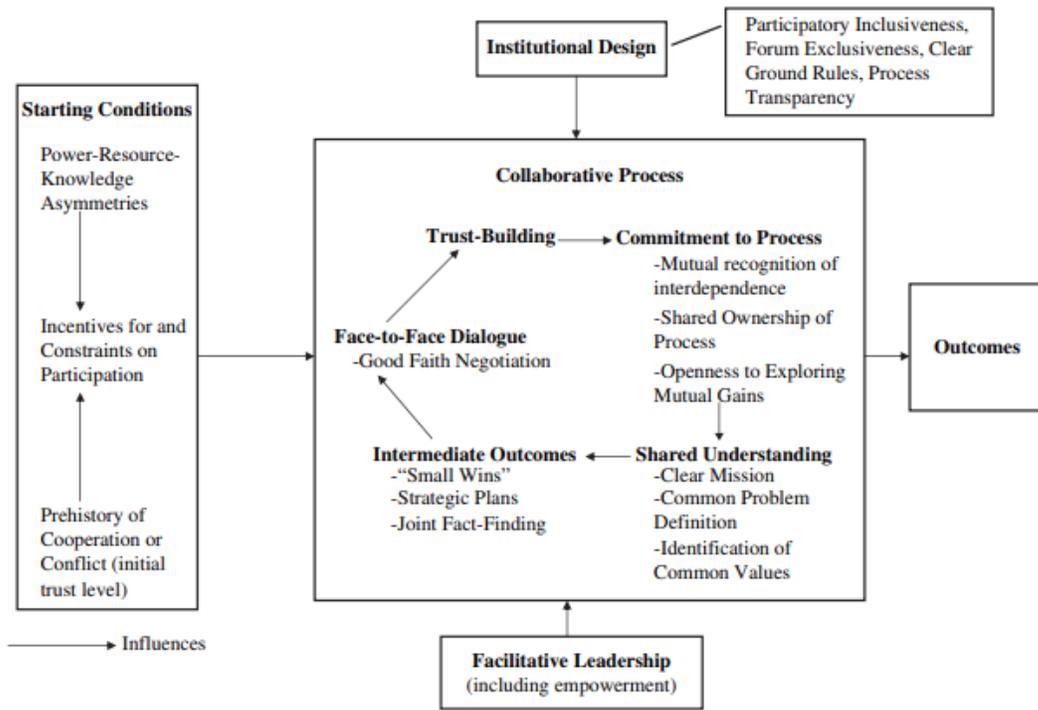
## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Collaborative Governance**

Arti dari kata Collaborative Governance ini memang sangat beragam menurut para ahli. Menurut *Ansell dan Gash*, Collaborative Governance merupakan sebuah aturan yang mengatur beberapa lembaga public secara langsung dan tentunya melibatkan non-state selaku pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal. Tentu hal ini dilaksanakan berorientasi pada konsensus dan juga musyawarah yang dimana hal tersebut bertujuan untuk membuat

maupun menerapkan semua kebijakan public dan untuk mengelola semua 18sset (Ansell & Gash, 2007).

Menurut Ansell and Gash Collaborative Governance sendiri memiliki model yang dimana model tersebut terdiri dari 4 varibael inti antara lain *starting conditions*, *institutional design*, *leadership*, and *collaborative process*.



Gambar 1.1 Model Collaborative Governance

a. Starting Condition

Kondisi yang ada pada awal terjadinya kolaborasi atau kerjasama akan sangat berpengaruh karena keadaan atau kondisi awal ketika terjadi kerjasama akan memfasilitasi kerjasama yang akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Biasanya terdapat 2 kasus yang dapat mempengaruhi dari kerjasama yang akan dilakukan yakni pertama biasanya pada masa lampau pernah terjadi masalah atau konflik antara pihak

yang bekerjasama. Namun disisi lain pada kasus kedua semua pihak tersebut memiliki tujuan yang sama dalam kerjasama tersebut. Maka dari itu yang harus menjadi perhatian utama yakni kasus pertama karena akan sangat berpengaruh kedepannya ketika proses kerjasama tengah berlangsung.

Dalam awal terjadinya kerjasama pada model Collaborative Governance ini sendiri harus memperhatikan beberapa hal. (1) Yang pertama adalah ketidak seimbangan kekuasaan dan sumber daya dimana hal ini sangat krusial. Maksudnya disini adalah ketika disuatu kondisi terjadi permasalahan salah satu atau beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki beberapa hal seperti status, sumber daya untuk dapat berpartisipasi, organisasi dan lainnya, hal tersebut akan sangat berpengaruh dan berpeluang besar para aktor-aktor kuat dan besar tersebut melakukan manipulasi. (2) Insentif untuk Berpartisipasi, hal ini bergantung pada apa yang menjadi harapan dari para pemangku kepentingan mengenai apakah proses kerjasama tersebut akan memberikan hasil yang maksimal terlebih mengenai keseimbangan waktu dan energi yang dikeluarkan ketika dilaksanakan kerjasama. Para pemangku kepentingan melihat hubungan langsung antara partisipasi mereka dan konkret nyata dan hasil kebijakan (Brown 2002). Tetapi mereka menolak jika para pemangku kepentingan hanya melihat masukan pemangku kepentingan lain untuk menjadi hanya penasehat atau sebagai seremonial (Futrell 2003). Terlebih lagi jika dari pihak pemerintah menyadari bahwa diri mereka memiliki hubungan baik dengan pihak legislative maupun kejaksaan. Pada kerjasama yang dilakukan biasanya partisipasi dari para pemangku kepentingan bersifat sukarela. (3) Selanjutnya adalah Sejarah dari kerjasama yang pernah dilakukan atau konflik yang pernah terjadi, tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kerjasama yang akan

dilakukan. Jika pada lampau pernah terjadi konflik antara para pemangku kepentingan maka sudah pasti hal tersebut akan menjadi sebuah penghambat ketika akan menjalin kerjasama. Akan tetapi sebaliknya, jika pada masa lampau pernah terjalin kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan maka hal tersebut akan memfasilitasi dan mempermudah kerjasama yang akan dilakukan kedepannya. Hal ini terkait mengenai kepercayaan karena jika pada masa lampau pernah terjadi konflik maka akan membuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan lain menjadi sangat rendah. Sebaliknya jika masa lampau pernah menjalin kerjasama dan berhasil maka akan menjadi sebuah modal kepercayaan yang tinggi.

b. Institutional Design

Institutional design ini mengarah pada aturan dasar ketika akan melakukan kolaborasi atau kerjasama. Hal ini sangat penting untuk legitimasi sebuah kerjasama atau kolaborasi. Jika melihat dari yang terjadi, sering sekali pemangku kepentingan tidak memiliki inisiatif untuk berpartisipasi. Terlebih ketika mereka melihat terdapat sebuah alternative untuk mewujudkan apa yang menjadi agenda mereka sendiri. Sebuah literature juga mengatakan bahwa aturan dasar yang jelas dan juga transparansi dari proses adalah fitur desain yang sangat penting. Kedua hal tersebut mengarah pada legitimasi dan tentunya membangun sebuah kepercayaan. Pada dasarnya pemimpin dan para pemangku kepentingan lain seharusnya terlibat secara langsung dalam negosiasi atau diskusi. Agar nantinya akan memberikan keuntungan atau hasil yang memuaskan bagi berbagai macam pihak.

c. Collaborative Process

Model dari proses kerjasama pemerintahan biasanya menggambarkan kolaborasi memiliki sifat berkembang secara bertahap. Dalam proses kolaborasi ini sendiri terdapat tiga tahap antara lain (1) Pengaturan masalah, (2) Mengatur arah, (3) Pengimplementasian. Proses dari kolaborative ini sendiri memang sulit untuk diwakili dan harus secara langsung tanpa perwakilan. Bahkan akan sangat sulit untuk dapat mengetahui bagaimana untuk memulai mendeskripsikan sebuah proses kolaborasi. Oleh karena itu, cara yang digunakan harus tepat seperti berkomunikasi langsung dengan cara face-to-face dialogue atau berdialog tatap muka, trust building atau membangun kepercayaan, commitment to the process atau berkomitmen terhadap suatu proses dan shared understanding atau memberikan pemahaman. Hal tersebut merupakan bagian dari proses kolaborasi atau proses kerjasama.

d. Facilitative Leadership

Facilitative Leadership mengarah pada pentingnya peran kepemimpinan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi antara para pemangku kepentingan. Ketika para pemangku kepentingan sudah tidak mampu untuk mencari solusi atau jalan tengah dari sebuah permasalahan, maka disaat itulah fungsi dari Facilitative Leadership ini berfungsi yakni dibutuhkan fasilitator untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam tahap ini biasanya banyak terdapat tekanan-tekanan dari pihak ketiga. Pihak ketiga disini memiliki fungsi untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan telah melaksanakan dan mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat. Pihak ketiga yang menjadi fasilitator ini harus memiliki pengaruh kepemimpinan yang cukup kuat dan mampu menjelaskan berbagai macam masalah yang cukup krusial.

Dalam jurnal lain juga mengatakan bahwa Collaborative Governance merupakan proses ataupun struktur yang dimana proses tersebut melibatkan berbagai macam pihak melintasi batas-batas organisasi tersebut. Kolaborasi tentu digunakan untuk menggambarkan sebuah kerjasama yang formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam kebijakan publik (N. L. Y. Dewi, 2019).

Selain itu juga terdapat definisi lain dari Collaborative Governance yang dimana hal ini didefinisikan sebagai sebuah proses dalam menetapkan, mengarahkan, memfasilitasi, dan tentu mengawasi rencana sebuah organisasi sektoral dalam menyelesaikan atau menangani setiap permasalahan kebijakan publik yang tidak akan dapat atau tidak akan mampu diselesaikan oleh satu organisasi saja (L. M. *Ulfa*, 2011). Dalam sebuah jurnal juga terdapat sebuah pendapat yang berasal dari Culpepper (Sranko 2011:211) yang mengatakan bahwa Collaborative Governance merupakan ketersediaan atau kesiapan yang mempromosikan interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan actor-aktor yang berasal dari luar pemerintah itu sendiri tanpa actor-aktor dari negara memonopoli pengartian masalah, penetapan semua tujuan, atau metode pelaksanaan (R. T. Dewi, 2012).

Jika kita berbicara mengenai Collaborative Governance itu sendiri, tentu tidak akan terlepas dari peran para aktor yang terlibat didalamnya. Dalam pelaksanaan Collaborative Governance, terdapat tiga (3) aktor yang akan paling berpengaruh dan paling penting. Ketiga aktor ini antara lain yang pertama tentu dari pihak Pemerintah, kedua adalah pihak swasta dan yang ketiga sudah pasti adalah masyarakat. Peran dari masing-masing aktor ini memang tidak dapat dipandang sepele. Ketiganya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan setiap program kerja yang

menggunakan Collaborative Governance. Apabila salah satu dari ketiga aktor ini tidak menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharuskan, maka tidak heran jika semua program kerja yang akan maupun yang sedang berlangsung tidak akan berjalan dengan baik. Jadi memang kolaborasi antar semua aktor yang terlibat sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kegiatan.

Berbicara mengenai Collaborative Governance ini sendiri memang bukanlah cara yang sangat sempurna dalam melaksanakan program kerja apapun itu. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa memang cara ini memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan dari cara-cara yang lain. Salah satu keunggulannya adalah dengan Collaborative Governance, masyarakat menjadi memiliki andil dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik itu mulai dari pengambilan keputusan sampai dengan eksekusi kegiatan tersebut. Keikutsertaan masyarakat ini pasti akan mempermudah dan memperlancar setiap kegiatan yang dilakukan baik dari saat proses pengerjaan sampai dengan selesai. Keterlibatan masyarakat mungkin terlihat seperti hal yang sederhana. Akan tetapi hal tersebut merupakan salah satu hal yang sangat krusial karena dengan keterlibatan mereka dalam setiap kegiatan pemerintah, mereka dapat menyampaikan aspirasi sehingga saat eksekusi atau pengerjaannya tidak ada yang dirugikan. Memang setiap sistem memiliki keunggulan seperti halnya yang tertulis diatas. Akan tetapi, hal itu juga pasti akan diikuti dengan kelemahan atau kekurangan dari sistem tersebut. Sebaik apapun sistem tersebut, pasti akan memiliki kekurangan atau kelemahan juga. Hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri adanya. Yang dapat dikatakan sebagai kelemahan adalah jika salah satu aktor memiliki peran yang sangat kuat. Yang dimaksud disini adalah dari pihak pemerintah,

jika pemimpin menganut gaya kepemimpinan komando pasti akan mendapat atau merasakan masalah dalam fase implementasi. Hal ini dikarenakan dengan gaya kepemimpinan seperti itu akan menyebabkan seorang pemimpin membatasi keterlibatan orang lain dalam hal ini para pemangku kepentingan saat terjadinya proses pengambilan keputusan. Perlakuan seperti itu pasti akan menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat merasa dirugikan atau merasa kurang puas (Bichler & Lösch, 2019).

### **1.6.2 Pengembangan Pariwisata**

Pada dasarnya Pengembangan dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau cara untuk dapat mengembangkan sesuatu tentunya kearah yang lebih baik lagi atau dapat dikatakan dikelola agar lebih baik. Selanjutnya pariwisata , jika dilihat dari bahasa sangsekerta pariwisata berasal dari dua kata yakni pari dan wisata. Pariwisata ini berarti melakukannya secara berulang, dan kata wisata dapat diartikan sebagai perjalanan. Jika digabung maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan berulang-ulang (Putri, 2015). Jika ingin melaksanakan atau melakukan pengembangan pariwisata, tentu kita harus dan sangat perlu memperhatikan berbagai macam hal.

Seperti yang dikatakan oleh Robert Christie Mill dalam buku yang berjudul *Tourism The International*, edisi bahasa Indonesia oleh Trio Sastrio, beliau mengemukakan bahwa terdapat empat (4) hal yang harus dan sangat penting diperhatikan ketika akan melakukan pengembangan pariwisata. Keempat hal tersebut yakni yang pertama tentu melakukan analisa pasar, kedua melakukan analisa teknik dan perencanaan, ketiga melakukan analisa sosio ekonomi, dan yang terakhir

melakukan analisa bisnis dan hukum. Melakukan pengembangan pariwisata sudah tentu harus diikuti dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada di kawasan wisata tersebut. Pengembangan wisata memang sangat bagus dan perlu dilakukan agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik secara maksimal. Akan tetapi satu hal yang sangat perlu dijaga ketika melakukan pengembangan adalah budaya dan juga tradisi lokal harus tetap dipertahankan agar menjadi identitas tempat itu sendiri.

Dalam melaksanakan pengembangan wisata, tentu tidak akan terlepas dari berbagai macam unsur yang harus diperhatikan. Terdapat beberapa unsur pengembangan pariwisata yang harus diperhatikan. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain :

- Daya Tarik : Pertama yakni daya tarik, daya tarik yang dimaksud disini adalah suatu hal yang dapat menarik minat dari para wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Contohnya seperti keindahan panorama alam yang dimiliki, keunikan dari kawasan tersebut baik dari segi flora fauna maupun keadaan khas dari tempat tersebut.
- Fasilitas Pelayanan : Unsur kedua yaitu Pelayanan dari kawasan wisata tersebut, pelayanan yang dimaksud disini adalah fasilitas-fasilitas pelayanan yang dapat membantu wisatawan saat sedang berada di kawasan tersebut. Contohnya adalah banyak tersedia tempat-tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti warung makan, toko pakaian dan berbagai macam tool kebutuhan lainnya. Selain itu, pada sebuah kawasan wisata juga sangat

diperlukan fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti Klinik kesehatan, apotek, pos penjagaan polisi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

- Transportasi : Unsur selanjutnya yaitu transportasi. Unsur ini memang sangat penting diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Karena akan sangat mempengaruhi arus dari para wisatawan. Perkembangan sistem transportasi pada sebuah kawasan wisata memang akan sangat mempengaruhi pada jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan tersebut. Ketersediaan berbagai macam jenis transportasi yang dapat digunakan untuk mengakses kawasan wisata tersebut akan membuat para calon pengunjung akan semakin bertambah karena akan dipermudah dengan akses-akses transportasi yang ada. Sebaliknya, apabila fasilitas transportasi pada kawasan tersebut cenderung kurang maka akan membuat para calon pengunjung kurang berminat berkunjung ke kawasan wisata tersebut.
- Akomodasi : Akomodasi yang dimaksud disini adalah akomodasi penginapan untuk keperluan para pengunjung atau para wisatawan. Tempat menginap seperti hotel dan lainnya akan sangat diperlukan agar dapat membantu atau menunjang wisatawan lokal maupun asing yang berasal dari daerah yang cukup jauh dengan kawasan wisata.
- Infrastruktur : Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur berperan sangat penting dalam pengembangan sebuah kawasan wisata. Karena dengan infrastruktur yang memadai maka akan membuat kawasan wisata tersebut semakin naik. Hal ini disebabkan oleh para pengunjung akan merasa sangat puas ketika infrastruktur yang ada pada kawasan tersebut lengkap. Contohnya

seperti akses jalan yang sudah bagus, adanya sumber listrik, terdapat sumber air bersih dan masih banyak lagi. Adanya infrastruktur juga sebenarnya tidak hanya menguntungkan para pengunjung atau para wisatawan. Akan tetapi, dengan adanya infrastruktur yang memadai maka akan menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada atau tinggal dikawasan wisata tersebut.

## **1.7 Definisi Konseptual**

Definisi Konseptual menurut Azwar (2007:72) merupakan sebuah rangkaian konsep yang dimana rangkaian tersebut disebut sebagai sebuah definisi konsep dan tentu maknanya masih sangat abstrak meskipun masih dapat dipaahami secara intuisi. Dalam penelitian ini, telah ditentukan definisi konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan agar lebih mempermudah dalam pelaksanaan penelitian.

### **1.7.1 Collaborative Governance**

Collaborative Governance ini merupakan sebuah pola kerja sama yang dimana dalam pola ini terjalin kerja sama antara beberapa stakeholder seperti kerja sama antara Pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak swasta.

### **1.7.2 Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan Pariwisata merupakan sebuah usaha dalam rangka meningkatkan kualitas suatu kawasan wisata baik dari segi pelayanan maupun dari segi infrastruktur yang dimiliki.

### **1.7.3 Kawasan Wisata**

Kawasan wisata ini merupakan sebuah tempat yang dimana pada tempat tersebut memiliki objek yang menarik untuk dapat dinikmati oleh orang-orang. Objek yang menarik tersebut dapat berupa hal yang bersifat alamiah maupun buatan dari manusia itu sendiri.

## **1.8 Definisi Operasional**

Menurut Sugiono (2015), Definisi Operasional merupakan sebuah nilai dari suatu objek atau kegiatan yang bervariasi dan hal tersebut telah ditentukan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan.

### **1.8.1 Collaborative Governance**

- a. Alasan penggunaan metode kerjasama
- b. Pihak dan pola dalam kerjasama
- c. Proses kerjasama yang dilakukan
- d. Fasilitator dalam memecahkan permasalahan

### **1.8.2 Pengunjung Pariwisata**

- a. Kepuasan Berwisata
- b. Keinginan Berwisata

### **1.8.3 Pengelola Pariwisata**

- a. Langkah Dinas Pariwisata dalam melaksanakan pengembangan
- b. Kontribusi Kelompok Sadar Wisata dalam pelaksanaan pengembangan
- c. Keterlibatan para pelaku pariwisata dalam mendukung keberhasilan sebuah pengembangan kawasan wisata
- d. Adanya daya tarik yang dimiliki oleh kawasan wisata pantai Ekas

## **1.9 Metode Penelitian**

Metode dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya metode penelitian maka akan lebih mempermudah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting ketika akan melaksanakan penelitian, harus terlebih dahulu memperhatikan dan menyiapkan metode apa saja yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam metode ini terdapat berbagai macam unsur yang sangat penting seperti jenis penelitian, bagaimana cara peneliti mengumpulkan data, siapa saja yang menjadi narasumber dalam penelitian tersebut dan beberapa unsur penting lainnya. Dalam penelitian kali ini, metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian kali ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Anselm Strauss (2013:4) Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang dimana semua hal yang ditemukan tidak didapatkan melalui proses statistik. Dengan menggunakan penelitian kualitatif akan mempermudah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara mendalam tetapi tentu saja dengan menggunakan atau berdasar data valid yang ada. Selain itu, penggunaan kualitatif ini juga dapat mempermudah pembaca karena hasil dari penelitian ini berbentuk deskripsi kata-kata yang berbentuk ilmiah.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat penelitian tersebut akan dilaksanakan. Sebelum melaksanakan penelitian, akan lebih efektif jika peneliti menentukan lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat penelitian tersebut. Pada penelitian kali ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah sebuah kawasan

wisata pantai di Kabupaten Lombok Timur yakni Pantai Ekas yang berada di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Pantai Ekas sendiri memang masih belum seterkenal pantai-pantai indah di Lombok seperti pantai Kuta di Lombok Tengah atau Pantai Senggigi di Mataram. Namun pemandangan pantai yang disuguhkan tidak kalah dengan pantai-pantai populer lainnya. Oleh karena itu hal ini menjadi sebuah dorongan bagi masyarakat pokdarwis ataupun pemerintah membuat pantai ini terkenal sama dengan pantai yang lain.

### **1.9.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian terdapat berbagai macam cara atau teknik dalam mengumpulkan data. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **a. Wawancara**

Teknik ini akan digunakan untuk menggali informasi yang detail terhadap poin-poin dari penelitian yang dimana hal tersebut dirangkum dalam sebuah pertanyaan wawancara. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung atau melakukan tatap muka antara peneliti dengan narasumber.

Dalam penelitian ini, beberapa orang yang akan menjadi narasumber antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pariwisata beserta Seluruh jajaran yang terkait.
2. Pihak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
3. Masyarakat umum dalam hal ini adalah masyarakat setempat yang berada di lokasi penelitian dan para wisatawan yang sedang maupun yang telah berkunjung

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencari data-data tambahan yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Biasanya data tambahan bisa didapatkan melalui dokumen pemerintah, buku, jurnal, berita, majalah, hingga skripsi terdahulu. Dokumentasi dalam penelitian ini akan menggunakan Dokumen milik Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Situs website resmi milik Dispar, buku yang terkait, dan penelitian terdahulu yang terkait.

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian dan biasanya berbentuk fakta dan angka. Dalam sebuah penelitian, data dapat diklasifikasikan menjadi dua (2) jenis yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung oleh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan (Hasan, 2002:82). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus terlebih dahulu memastikan atau menentukan siapa yang akan menjadi informan atau yang menjadi narasumber dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan menjadi narasumber atau informan. Beberapa orang tersebut berasal dari latar yang berbeda-beda yakni antara lain :

| <b>Narasumber</b> | <b>Jabatan</b>  | <b>Keterangan</b>   |
|-------------------|-----------------|---------------------|
|                   | 1. Kepala Dinas | 1. Untuk Mengetahui |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Dinas Pariwisata<br/>Kabupaten Lombok<br/>Timur</p> | <p>Pariwisata<br/>beserta seluruh<br/>jajarannya</p>                         | <p>kebijakan dalam<br/>pelaksanaan<br/>pengembangan<br/>kawasan wisata</p> <p>2. Untuk Mengetahui<br/>bentuk kerja sama<br/>dengan masyarakat<br/>saat melaksanakan<br/>pengembangan.</p> <p>3. Untuk Mengetahui<br/>sistem pendanaan<br/>dari setiap<br/>pengembangan<br/>kawasan wisata</p> |
| <p>Kelompok Sadar<br/>Wisata<br/>(POKDARWIS)</p>       | <p>1. Ketua dan<br/>anggota<br/>Pokdarwis<br/>Kabupaten<br/>Lombok Timur</p> | <p>1. Untuk Mengetahui<br/>keterlibatan<br/>Pokdarwis dalam<br/>upaya<br/>pengembangan<br/>kawasan wisata</p>   |
|  | <p>1. Masyarakat<br/>setempat yang</p>                                       | <p>3.2 Untuk mengetahui<br/>sejauh mana</p>   |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Masyarakat Umum | ada di kawasan wisata Pantai Ekas<br>2. Para wisatawan yang berkunjung | implementasi kebijakan dan sejauh mana kepuasan mereka terhadap pengembangan yang dilakukan di kawasan tersebut. |
|-----------------|--|--|

*Tabel 1.2 Narasumber*

b. Data Sekunder

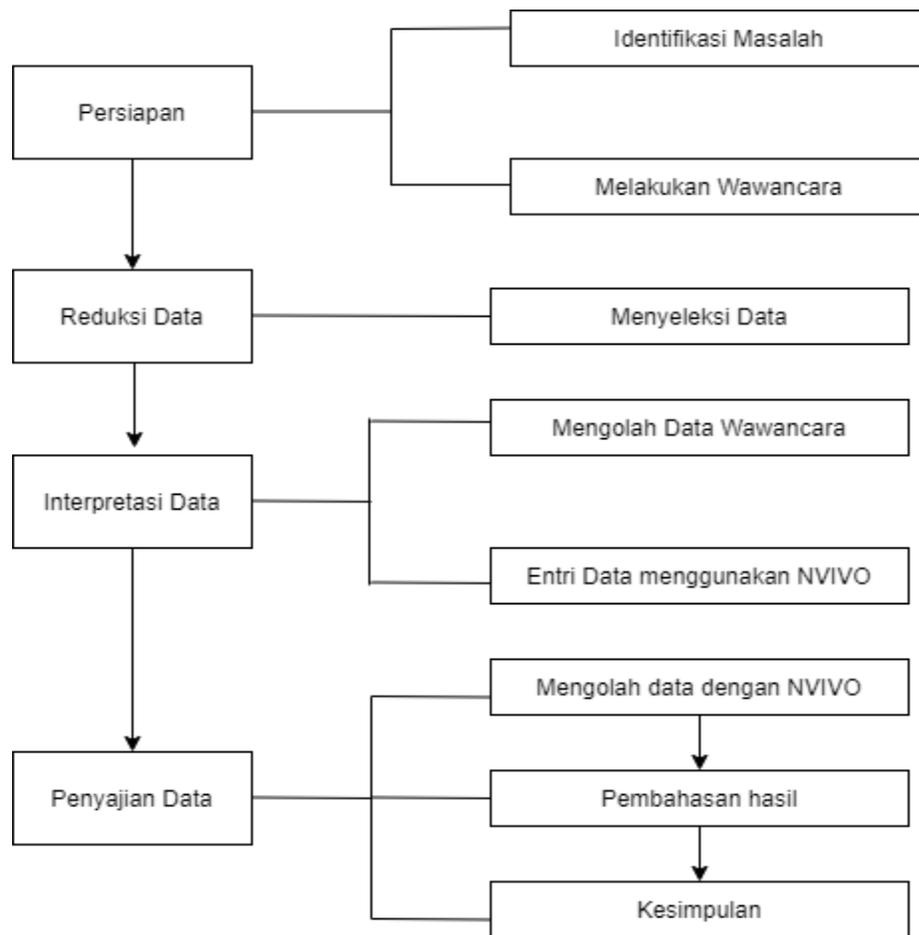
Data Sekunder merupakan sekumpulan data atau informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui sumber-sumber terdahulu yang sudah ada. Keberadaan dari data sekunder ini sendiri dibutuhkan untuk memperkuat atau menambah data primer yang didapatkan peneliti. Contoh sumber data sekunder ialah seperti dokumen pemerintah, buku, jurnal, laporan penelitian terdahulu dan masih banyak lagi sumber data sekunder yang lain.

Dalam penelitian ini, beberapa sumber yang akan menjadi data sekunder adalah :

1. Dokumen-Dokumen yang terdapat pada Dinas Pariwisata
2. Website milik Dinas Pariwisata Lombok Timur
3. Buku dan segala macam penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan pengembangan pariwisata dengan menggunakan Collaborative Governance.

### 1.9.4 Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan proses menyusun data yang dimana data tersebut dikategorikan dan kemudian dari banyaknya kategori yang ada selanjutnya dilakukan identifikasi pola hubungan terhadap kategori tersebut. Terdapat beberapa proses dalam melakukan analisis data pada proses penelitian. Beberapa proses tersebut antara lain reduksi data, interpretasi, dan penyajian data.



*Gambar 1.2 Proses Analisis*

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang dimana tujuan dari reduksi atau penyederhanaan ini ialah untuk mempertajam dan tentu membuang data yang tidak dibutuhkan sehingga nantinya akan mudah untuk mengambil kesimpulan akhirnya.

b. Interpretasi

Interpretasi ini merupakan sebuah tahap dimana semua data yang telah didapatkan diolah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan atau menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada di dalam penelitian.

c. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data ini, peneliti dapat menyusun sebuah deskripsi untuk dapat menarik kesimpulan dari data-data yang telah melewati kedua tahap diatas. Pada penelitian kali ini, peneliti akan menyajikan atau membuat display data menggunakan NVIVO.